

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya akuntansi di Indonesia, standar akuntansi pemerintah menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan suatu laporan keuangan. Akuntabilitas adalah awal pelaporan keuangan pada pemerintahan dan didasari kewajiban masyarakat agar mengetahui serta memberikan keterangan atas pengelompokan sumber daya maupun kegunaannya (*Governmental Accounting Standards Board* (1999) dalam Mansur, dkk (2017). Untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menginformasikan laporan keuangannya.

Laporan keuangan merupakan bentuk nyata pertanggungjawaban pihak manajemen kepada pemilik terkait pengelolaan keuangan yang telah dilakukan dalam suatu organisasi pada periode tertentu (Astutik, 2017). Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 bahwa ciri-ciri dan unsur-unsur bentuk kualitas informasi akan membuat informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat antara lain (a) berguna secara langsung, (b) dapat dipercaya, (c) bisa dibandingkan dan (d) bisa dimengerti. Informasi yang terdapat di Laporan keuangan yang di informasikan pada Pemerintah Daerah banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh banyak pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang baik adalah yang bersifat *comparable* (dapat dibandingkan) dan *understandable* (mudah dimengerti), sehingga laporan keuangan tersebut berkualitas (Tri Wahyuni, 2016).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah penting karena salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Fenomena di lapangan masih menunjukkan bahwa dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai (Winidyaningrum, 2010). Permasalahan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah, yaitu terkait dengan *asministrative accountability* dan *profesional accountability*, dimana isu pokok yang muncul adalah buruknya kualitas pengelolaan anggaran daerah yaitu sedikitnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (Pambudi dan Murtini, 2016). Masih rendahnya kualitas pelaporan keuangan tersebut tidak lepas karena masih rendahnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, penerapan Sistem akuntansi Keuangan (SAK) Daerah dan kompetensi dari SDMnya.

Penerapan SAP disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar (Permendagri No. 64 tahun 2013). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku dewasa ini menggunakan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) sesuai ketentuan pemerintah dengan menerbitkan PP No 71 tahun 2010 mengenai penerapan basis akrual penuh didalam akuntansi pemerintahan. Penerapan SAP berbasis akrual merupakan persyaratan yang

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Evicahyani dan Setiawina (2016).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Daerah yang baik harus dipenuhi beberapa hal yang merupakan syarat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah terdapat serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditunjukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan baik pihak intern maupun pihak ekstern Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi (Gala, 2013). Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, artinya laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk, sehingga didalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian karena tidak sesuai dengan standar pelaporan, maka akan berdampak buruk pada kualitas laporan keuangan (Mahmudi, 2010).

Sumber daya manusia yang kompeten sangat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang mampu memahami dan kompeten dengan didukung latar belakang pendidikan akuntansi yaitu dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Kegagalan SDM pada Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Windiasuti, 2013). Pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi dibutuhkan untuk dapat

mengelola informasi akuntansi. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Jepara salah satu yang telah mengaplikasikan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kabupaten telah mempersiapkan langkah-langkah persiapan guna melancarkan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam kaitannya dengan keuangan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa tahun terakhir ini pemerintah mencoba untuk mencari basis akuntansi yang tepat agar dapat diterapkan dalam akuntansi pemerintahan. Sifat pemerintah yang unik, menjadikan basis akuntansi yang akan diterapkan menjadi kendala tersendiri.

Penelitian tentang kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti yang hasilnya masih inkonsisten. Hasil penelitian Rahayu, dkk (2014), Evicahyani dan Setiawina (2016), Triwahyuni (2016), Pujanira (2017), Astuti (2017), Sanjaya (2017), Purwanto (2019) menunjukkan bahwa penerapan SAP akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Rahma dan Zulkifli (2018) justru terjadi sebaliknya bahwa penerapan SAP berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan Rahayu, dkk (2014), Triwahyuni (2016), Pujanira (2017), Sanjaya (2017) menunjukkan bahwa penerapan SAK berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Ratifah (2012) dan Latifah (2018), Rahma dan Zulkifli (2018) yang menunjukkan sebaliknya bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Astuti (2017), Pujanira (2017), Sanjaya (2017) menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Rahma dan Zulkifli (2018), Rahayu, dkk (2014), Triwahyuni (2016), Latifah (2018) bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Untuk itu, penelitian **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”** ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan standar akuntansi berbasis akrual dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Jepara.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini merupakan permasalahan inti yang akan dibahas pada penelitian. Dan pada penelitian ini akan membahas mengenai:

1. Apakah penerapan standar akuntansi berbasis akrual mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Jepara?

2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara?
3. Apakah sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Daerah Jepara mempengaruhi kualitas laporan keuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi berbasis akrual, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Jepara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya terkait dengan kualitas laporan keuangan serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur – literatur maupun penelitian di bidang Akuntansi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menambah pengetahuan yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk melatih kemampuan dalam berpikir kritis sekaligus menentukan solusi atas masalah di masa depan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran untuk perbaikan sekaligus meningkatkan sumber daya manusia khususnya pegawai di bidang keuangan instansi pemerintah daerah.